# BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap narasumber yang diperlukan untuk penelitian, serta diskusi yang berfokus pada permasalahan yang diteliti. Pada bab hasil peneltitian dan pembahasan ini, akan menguraikan beberapa hal mengenai hasil wawancara pada bulan April - Mei yang di lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Dermaga Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene Dan Kepuluan dalam memenuhi kebutuhan inforamsi.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penentuan harga atau anggaran program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pendekatan atau konsep apa yang digunakan dalam penentuan harga atau anggaran pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara bertahap dalam rentang waktu pada bulan April sampai dengan Mei, hasil penilitan ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam terhadap narasumber sebagai bentuk pencarian data dan observasi non partisipan dilapangan yang kemudian peneliti analisi.

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. **Sejarah Singkat Terbentuknya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep**

Pada hakekatnya transportasi adalah prosess perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lain menggunakan sarana transportasi. Sejalan dengan kemajuan teknologi transportasi semakin padat dari waktu kewaktu sehingga perlu diatata dan dikelola secara baik dan profesional agar aktivitas transportasi tidak menganggu mobilitas/aktifitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dengan ditetapkan undang-undang nomor 29 tahun 2959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi dibentuk pula satuan kerja yang bertugas menangani masalah transportasi yang saat ini berbentuk organisasi perangkat daerah dinas perhubungan.

Semenjak dibentuk beberapa dekade lalu telah berganti nama atau nomenklatur organisasi yaitu dengan nama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan Raya, kemudian pada tahun 1999 berubah nomenklatur menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) dan sekitar tahun 2008 berubah nomenklatur menjadi dinas perhubungan kominikasi dan informatika. Selanjutnya pada periode Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai saat ini, kembali berubah nomenklatur menjadi Dinas Perhubungan.

1. **Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Dinas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 12 Jabatan Struktural dengan rincian: 1 Jabatan Tinggi Pratama: 4 Jabatan Administrator dan 7 Jabatan Pengawas sebagaimana tergambar dalam susunan jabatan seagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Sekretaris
3. Kasubag Keuangan
4. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
7. Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana
8. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Angkutan Jalan
9. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut
10. Kepala Seksi Pengendalian operasional Angkutan Laut
11. Kepala Seksi Bina Jasa Angkutan Laut
12. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
13. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Angkutan Jalan
14. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Angkutan Laut
15. **Sumber Daya Aparatur**

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Dan Kepulauan sebanyak 40 orang PNS dan 50 orang Tenaga Harian Lepas (Honorer) dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel 4. 1   
Jumlah Pegawai Dinasi Perhubungan dirinici Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Kepegawaian | Tingkat Pendidikan | | | | | | | Jlh |
| SD | SLTP | SLTA | DIPLOMA | SI | S2 | S3 |
| 1 | PNS | - | - | 8 | - | 15 | 6 | - | 29 |
| 2 | THL | - | - | 35 | 6 | 9 | - | - | - |

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Pangkep 2025

## B. **Penyajian Data (Hasil Penelitian)**

1. **Penentuan Biaya Program Kegiatan pada Dinas Perhubungan**

Penentuan biaya untuk pelaksanaan Program Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep dan Kepulauan telah diatur dalam ketentuan peraturan yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang pefoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hasil Penelitian dilapangan diperoleh gambaran bahwa penentuan biaya untuk pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perhubungan secara garis beras melalui 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis Dinas

Rencana strategis (Renstra) Perangkat daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah daerah sekaligus merupakan Renja Jangka menengah perangkat daerah yang berisi capaian perangkat daerah pada Periode sebelumnya, Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Programdan Kegiatan Pokok perangkat Daerah.

Dalam hubungan dengan penentuan biaya/anggaran program/kegiatan pokok ditentukan berdasarkan platfrom Anggaran yang dialokasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), disisi lain, Kasabung Keuangan Dinas Perhubungan (Irfan Patau, SE) menjelaskan bahwa “Dalam hal penentuan biaya pada kegiatan pokok masih menggunakan estimasi atau berdasarkan biaya atau anggaran kegiatan serupa yang dilakukan pada tahun sebelumnya atau berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui Musyawarah Rencana (Musrembang) tahun sebelumnya”. Dari kedua pendapat tersebut diatas, Penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan pembanganunan Dermaga kurang maksimal yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah kurang maksimal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah penentuan biaya/anggarannya didasarkan pada estimasi biaya, tidak pada hasil perhitungan data lapangan.

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupukan penjaaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, bertujuan untuk menguraikan rincian program, kegiatan, serta anggaran satuan kerja dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penyusunan itu melalui 2 tahap, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renja.
2. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja perangkat daerah memuat beberapa penting, antara lain:

1. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Hal utama yang diuraikan pada bagian ini adalah kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini berisi tentang uraian/penjelassan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perkiraan berdasarjan pagu indikatif.

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Rencana Kerja dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi progran dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dalam penyusunan RKA ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan, yaitu :

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
2. Penganggaran Terpadu; dan
3. Penganggaran berdasarjan Kinerja. (PP Nomor 12 Tahun 2019).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep adalah penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap dokumen RKA Dinas Perhubungan yang memenuhi kriteria pasal 97 PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu berpedoman pada:

1. Indikator Kinerja;
2. Tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisi standar belanja;
3. Standar harga satuan
4. Rencana kebutuhan BMD; dan
5. Standar Pelayanan minimal.

Dalam konteks ini, penentuan biaya pelaksanaan program kegiatan pada prinsipnya mengacu pada Standar Satuan Harga yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor … Tahun 2024 tentang standar satuan harga ini telah direkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah sehingga pada saat pengimputan kegiatan maka Biayanya bisa secara otomatis sesuai Dengan Standar Satuan Harga. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian terhadap kegiatan pembangunan dermaga, satuan harganya masih dihitung berdasarkan biaya pemangunan dermaga tahun sebelumnya dengan cara membagi jumlah anggaran pembangunan dermaga dengan panjnag dermaga yang dibangun atau dengan rumus :

Satuan harga = Jumlah anggaran pemb. dermaga tahun sebelumnya

Panjang Dermaga yang dibangun

Hasil perhitungan biaya tersebut selanjutanya diajukan kebadan pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diimput kedalam Aplikasi Sistem Keungan Daerah.

1. **Pendekatan atau Metode yang digunakan dalam penentuan biaya/ atau anggaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kebupaten Pangkajene dan Kepulauan**.

Metode penentuan biaya pada hakekatnya merupakan cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok suatu barang yang dihasilkan. Dalam kaitan ini berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen anggaran dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diketahui bahwa format/form yang digunakan dalam penentuan biaya sudah memenuhi kriteria penentuan biaya yang lazim digunakan dalam akuntasi karena didalamnya sudah termuat nama Kegiatan/Produk; Volume barang; Harga satuan; Pajak. Namun ketika ditanyakan kepada informan yang merupakan pihak-pihak terkait langsung dalam penyusunan anggaran, mereka tidak mengetahui secara pasti metode atau pendekatan apa yang digunakan dalam penyusunan anggaran/penentuan harga. Menurut Sardiansyah, SE. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan bahwa “dalam menyuun anggaran mereka hanya berpedoman pada ketentuan peratutaran yang berlaku atau mereka hanya mengikuti format yang sudah ditentukan dalam ketentuan yang mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran”. Hal senada juga dikemukakan oleh Irfan Patau,SE. Kasubag Keuangan mentakan bahwa “dalam hal penyusunan anggaran Perangkat Daerah semua formatnya sudah ditentukan, dan Perangkat Daerah hanya mengikutinya sebab sudah dibuat dalam bentuk Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah”. Output dari Aplikasi yang dimaksud sebagaimana tergambar pada tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4. 2   
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan**



Mencermati hasil data penelitian tersebut diatas, diketahui bahwa data yang dimaksud belum memenuhi unsur penentuan biaya manakalah diakaikatkan dengan Metode Penentuan biaya atau dengan kata lain, sampai pada tahapan penentuan biaya dalam DPA, Dinas Perhubungan belum mengimplementasikan konsep *costing* sebagaimana mestinya. Data yang diuraikan pada tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa harga yang ditentukan tidak menggambarkan berapa volume yang harus dikerjakan, biaya material, *overhead* dan biaya tenaga kerja. Menurut data yang diperoleh dari Sardiansyah, SE (Kasabug Perencenaan dan Pelaporan) bahwa “Anggaran dalam DPA akan dijabarkan lebih lanjut oleh konsultan Perencanaan Teknis (Pihak penyedia jasa Konsultan) yang ditunjuk untuk menyusun perencanaan Teknis, dan pada tahapan ini baru bisa diukur atau diketahui berapa volume rill dari suatu kegiatan pembagnuan dermaga, komponen/material apa yang akan digunakan”. Bentuk Rencana anggaran biaya yang disusun oleh konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Samatellu sebagaimana tergambar pada tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4. 3   
Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Dermaga pulau Samatellu Tahun Anggaran 2024**





Mencermati RAB diatas, sudah terlihat perbedaan antara penetapan biaya pada RKA/DPA dengan RAB yang dibuat oleh konsultan Perencanaan, perbedaan utama terlihat pada uraian pekerjaan yang telah merinci komponen biaya material.volume dan besaran pajak. Menurut penjelasan Akmal ST. (Konsultan Perencanaan) bahwa “Anggaran tersebut dalam RAB diatas sudah termasuk Keuntungan/biaya *Overhead* dan biaya tenaga kerja atau sudah diperhitungkan pada harga material”. Selanjutnya ketika peneliti menanyakan bagaimana cara perhitungan biaya setiap komponen kegiatan, Akmal,ST. Menjelaskan bahwa nilai tersebut diperoleh dari hasil analisi harga satuan yang didalamnya mencakup:

1. Harga pokok material Dermaga ( Kayu ulin, Paku)
2. Upah tenaga kerja : Mandor Kepala Tukang, Tukang Kayu Dan Pekerja
3. Peralatan (Sewa, Genset, BBM)

Analisis harga satuan sebagaimana dimaksud, dapat diliat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 4   
Analisis harga satuan komponen biaya pembangunan dermaga kayu**









## **C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan**)

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut di atas, proses penetapan biaya pada dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cukup rumit, kurang efisien sebab untuk sampai pada detail harga harus menyewa jasa konsultan dimana sesuai data yang kami peroleh untuk satu kegiatan butuh biaya Rp.600.000,- dari sinilah terlihat betapa pentingnya menerapkan Konsep *Costing* dalam setiap kegiatan karena penetapan biaya dapat dilakukan lebih sederhana, efisien, dan tidak berbelit-belit.

* 1. **Penentuan Biaya Menggunakan Konsep *Costing***

Dalam Konsep *Costing*, dikenal beberapa pendekatan dalam penentuan biaya, salah satu diantaranya adalah variabel *costing*. Penetapan biaya pembangunan dermaga menggunakan variabel *costing* sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4. 5   
Penetapan Biaya Pembangunan Dermaga Pulau Sametellu Dengan Metode Variabel Costing**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Biaya** | **Vol.** | **Satuan** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah** |
|  |  |  |  |  |  |
| A | **PEKERJAAN PERSIAPAN** |  |  |  |  |
|  | Mobilisasi dan demobilisasi | 1 | Ls | Rp 3,000,000 | Rp 3,000,000 |
|  | Rencana Keselanatan Kerja (RKK) | 1 | Ls | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 |
|  | **Sub Total** |  |  |  | **Rp 4,000,000** |
| B | **Biaya Bahan Baku** |  |  |  |  |
|  | **Biaya Pembangunan Dermaga** |  |  |  |  |
| 1 | Pek. Tiang 14/14cm Kayu Ulin | 1.36 | m3 | Rp 18,150,000 | Rp 24,684,000 |
| 2 | Pek. Gelegar melintang 6/12cm kayu ulin | 0.24 | m3 | Rp 18,982,700 | Rp 4,555,848 |
| 3 | Pek. Gelegar memanjang 6/12cm kayu ulin | 0.82 | m3 | Rp 18,982,700 | Rp 15,565,814 |
| 4 | Pek. Skoer melintang 3/12cm kayu ulin | 0.18 | m3 | Rp 18,982,700 | Rp 3,416,886 |
| 5 | Pek. Skoer memanjang 3/12cm kayu ulin | 0.42 | m3 | Rp 18,982,700 | Rp 7,972,734 |
| 6 | Pek. Lantai Papan 3/12cm kayu ulin | 64.81 | M2 | Rp 601,700 | Rp 38,996,177 |
| 7 | Pek. Penjepit Lantai papan 3/10 kayu ulin | 0.23 | M3 | Rp 18,982,700 | Rp 4,366,021 |
| 8 | Pas. Baut dan mor P. 25cm-28cm Kunci 19 | 180 | bh | Rp 14,121 | Rp 2,541,780 |
| 9 | Pek. Tiang Tangga 6/12 cm kayu ulin | 0.23 | m3 | Rp 18,982,700 | Rp 4,366,021 |
| 10 | Pek. Anak Tangga 3/12cm kayu ulin | 1.2 | M2 | Rp 601,700 | Rp 722,040 |
|  | **Sub total** |  |  |  | **Rp 107,187,321** |
| C | **Biaya Tenaga Kerja** |  |  |  |  |
| 1 | Pekerja | 25.3 | OH | Rp 135,000 | Rp 3,415,500 |
| 2 | Tukang Kayu | 65.6 | OH | Rp 150,000 | Rp 9,840,000 |
| 3 | Kepala Tukang | 7.56 | OH | Rp 165,000 | Rp 1,247,400 |
| 4 | Mandor | 1.27 | OH | Rp 175,000 | Rp 222,250 |
|  | **Sub Total** |  |  |  | **Rp 14,725,150** |
| D | **Biaya Peralatan** |  |  |  |  |
| 1 | Sewa Mesin Genset | 3.25 | hari | Rp 57,500 | Rp 186,875 |
| 2 | Bahan Bakar Mesin Genset | 16 | jam/ltr | Rp 8,000 | Rp 128,000 |
|  | **Jumlah Harga alat** |  |  |  | **Rp 314,875** |
|  |  |  |  |  |  |
| E | **Biaya *Overhead*** |  |  |  |  |
|  | Biaya *overhead* (total A+B+C+D) | 10 | % | Rp 126,615,371 | Rp 12,661,537 |
|  | **Sub total** |  |  |  | Rp 12,661,537 |
|  | **Total** |  |  |  | Rp 138,888,883 |
| F | **PPN** | **11** | **%** | Rp 138,888,883 | **Rp 15,277,777** |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **Rp 154,166,660** |

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa ada 5 (lima) komponen biaya pembangunan Dermaga yaitu:

1. Bahan baku berupa kayu ulin dengan total biaya sebesar

Rp. 107.187.321;

1. Biaya tenaga kerja sebesar Rp 14,725,150.- ;
2. Biaya peralatan sebesar Rp. 314.875;
3. Biaya Overhaed ditetapkan sebesar 10% atau Rp. 12.661.537 dan;
4. Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 % atau Rp. 15.277.777

Mencermati hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan perhitungan anggaran sebesar Rp.159.931.156,- sedangkan menggunakan variabel *costing* sebesar Rp. 154,166.660 sehingga terdapat selisih dimana menggunakan varibel *costing* lebih hemat sebesar Rp. 5.764,496. Hal ini dikarenakan pada RAB Pembangunan Dermaga Dinas Perhubungan komponen biaya pekerjaan (tenaga kerja, peralatan, biaya *overhead*) diperhitungkan dalam setiap item pekerjaan seperti contoh pekerjaan gelagar melintang dan pekerjaan gelagar memanjang anggarannya sama masing-masing sebesar Rp. 24.526.095,00- yang diambil dari analisis harga satuan 1 m3 pekerjaan gelagar kayu ulin dimana pada analisis harga satuan ini didalamnya sudah termasuk komponen biaya tenaga kerja, peralatan dan biaya *overhead*.

Untuk memperoleh gambaran secara rinci perbedaan perhitungan biaya oleh Dinas Perhubungan dengan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Perbedaan Selisih Perhitungan biaya oleh Dinas Perhubungan dengan Variabel *Costing***

Dalam tabel 4.6 diatas terlihat jelas adanya perbedaan penetapan biaya yang dilakukan dinas perhubungan dimana pada perhitungan tersebut tidak diuraikan komponen biaya tenaga kerja, biaya *overhead*. Berdasarkan hasil penelitian dokumen anggaran (analisis harga satuan…) diketahui bahwa biaya tenaga kerja itu sudah diincludekan dalam kompenen harga material kayu. Sehingga mengakibatkan adanya perbedaan dimaksud.

**2. Perbedaan Hasil Penentuan Biaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan Penentuan Biaya Menggunakan Konsep *Costing***

Beberapa perbedaan hasil penentuan biaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan penentuan biaya menggunakan konsep *costing* yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

* 1. Penentuan biaya yang dilakukan Dinas Perhubungan

1. Penentuan biaya melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, RKA, RAB.
2. penentuan anggaran tidak menggunakan metode tertentu tapi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Komponen biaya atau item pekerjaan, volume kegiatan pembangunan/rehab dermaga pada saat penentuan biaya atau anggaran belum ditentukan tapi baru ditentukan saat penyusunan Rancangan anggaran Belanja yang dilakukan oleh penyedia jasa Konsultan Konstruksi
4. Penentuan biaya menggunakan Konsep *Costing*
5. Penentuan biaya menggunakan konsep *costing* dapat menggunakan beberapa metode salah satu diantaranya variabel *costing*.
6. Seluruh komponen biaya pembangunan/rehab dermaga harus diuraikan secara detail.